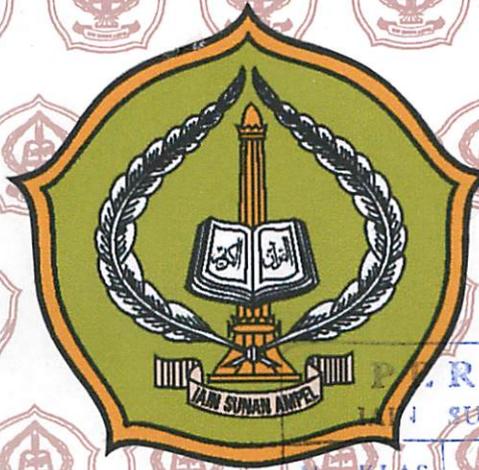


**SISTEM JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA KARYAWAN DI PT. PAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)**



PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS. K D.2012/036
NO. REG. D.2012/10/036
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh : *MD*

DENY PRATAMA AGUNG
NIM. B04208033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
2012

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deny Pratama Agung

NIM : B04208033

Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Jl. Tanah Merah 4 gang Masjid no. 22 Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 5 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Deny Pratama Agung)

NIM. B04208033

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Deny Pratama Agung
Nim : B04208033
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Karyawan di PT. PAL Indonesia

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 6 Juli 2012

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing,



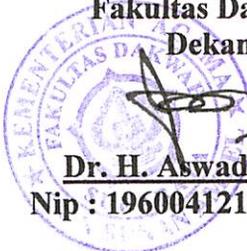
Aun Falestien Faletehan, MHRM

NIP. 198205142005011001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

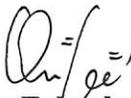
Skripsi oleh Deny Pratama Agung ini telah dipertahankan
didepan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 18 juli 2012

Mengesahkan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Dakwah
Dekan



Dr. H. Aswadi, M. Ag
Nip : 196004121994031001

Ketua



Aun Falestien Faletchan, MHRM
Nip : 198205142005011001

Sekretaris



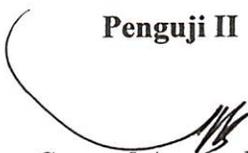
Deasy Tantriana, MM
Nip : 198312282011012009

Penguji I



Ahmad Khairul Hakim, M.Si
Nip : 197512302003121001

Penguji II



Samsul Anam, MM
Nip : 196803072008011017

ABTRAKSI

Deny Pratama Agung, NIM B04208033, 2012. Sistem jaminan Keselamatan dan Kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak apa saja yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia berkaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, Kriteria apa yang di pakai oleh PT. PAL Indonesia untuk pemberian sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan bagaimana perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL indonesia.

Dalam mengetahui persoalan di atas, penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yaitu untuk memaparkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan di PT. PAL Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak-hak yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia yang terkait dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja adalah PT. PAL Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas penunjang agar tidak adanya kecelakaan yang diakibatkan pekerjaan. Fasilitas ini seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan, poliklinik, dan ditunjang oleh asuransi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para karyawan saat melakukan aktifitas pekerjaan, adapun untuk kriteria yang di gunakan PT. PAL Indonesia dalam menentukan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima oleh karyawan adalah status karyawan di PT. PAL Indonesia (pegawai tetap atau pegawai tidak tetap), status karyawan (sudah berkeluarga atau tidak) dan tingkat jabatan karyawan tersebut dan Perbedaan yang diterima oleh karyawan tetap dan tidak tetap adalah Karyawan tetap adalah selain mendapatkan asuransi dari Jamsostek karyawan tetap juga dapat pelayanan kesehatan dari poliklinik yang terdapat di PT. PAL Indonesia karyawan tidak tetap adalah dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia tidak dapat menerima pelayanan kesehatan dari poliklinik PT. PAL Indonesia

Kata kunci : Sistem, Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan sistem di atas sesungguhnya sesuatu kebutuhan, baik dalam rangka pertimbangan ekonomi (*Efisiensi* dan *Safety*), maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan la¹ adalah dalam rangka perdagangan bebas (*Free Trade Barrier*) yang menuntut kepedulian terhadap sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sertifikasi produk dan sistem jaminan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan akhir-akhir ini, sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sudah menjadi prasyarat dalam ISO 9000:2000 dan CEPAA (*Council On Economic Priorities Accreditation Agency*) sosial *accountability*.¹

PT. PAL Indonesia adalah perusahaan bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama *Marine Establishment* (ME) dan pada saat itu telah diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akta No. 12, yang dibuat oleh Notaris Hadi Moentoro, SH. Lokasi Perusahaan di jalan Ujung, Surabaya, di bawah pimpinan Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie. Lima tahun kemudian bertepatan

¹ Rahimah Azmi D, 2008, "*Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton Medan,*" Diakses pada tanggal 16 maret 2012, dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14644/1/09E01016.pdf>

sendiri adalah kewajiban menjamin kesehatan seseorang/karyawan dari segala bentuk penyakit atau gangguan kesehatan.

4. Pengertian Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sudah termasuk konsep utuh jika mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian jaminan keselamatan dan kesehatan ini adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.⁵

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut. Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang gambaran umum yang meliputi konteks penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

⁵“*Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*”. 2011, diakses pada tanggal 24 Maret 2012, dari <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja>.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menampilkan beberapa riset yang relevan dengan judul yang akan peneliti teliti, yaitu :

1. Gastalia melakukan riset tentang analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada area produksi divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja. penelitian yang dikerjakan Gestalia pada tahun 2007 ini bertujuan untuk menganalisa segala kegiatan atau usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di area produksi divisi fabrikasi, termasuk pembuatan peraturan, perundang-undangan, jaminan kecelakaan, serta kegiatan pengendalian, pengawasan dan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan perusahaan ini sudah cukup baik.⁶

Hal yang membedakan riset Gastalia dengan penelitian ini adalah bahwa Gastalia berusaha menganalisa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ada satu divisi saja yaitu di bagian area produksi divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja. Karena menurut Gastalia di bagian divisi ini adalah salah satu bagian dapat dilihat akan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang

⁶ Gastalia, 2012, “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada area produksi Divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja” Di akses ada tanggal 29 juni 2012. <http://library.gunadarma.ac.id/repository/2012/06/20120629/analisis-penerapan-sistem-manajemen-keselamatan-dankesehatan-kerja-k3-pada-area-produksi-divisi-fabrikasi-ptsanggar-sarana-baja.html/>

dilakukan perusahaan selama ini sudah cukup baik. Selain itu, akan dilakukan juga identifikasi terhadap segala risiko bahaya kesehatan dan kecelakaan yang terjadi selama ini, untuk mengetahui apakah kegiatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan perusahaan sudah cukup efektif di dalam menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia secara umum. Hal lain yang membedakan penelitian yang dilakukan Gastalia dengan penelitian ini adalah dari segi objek. Dalam riset Gastalia lebih fokus pada perusahaan swasta sementara objek dari penelitian ini adalah suatu perusahaan pemerintah (BUMN) yang bergerak di bidang perkapalan.

2. Ristanti Padminingsih adalah salah satu alumni jurusan administrasi bisnis yang mengangkat judul pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas karyawan pada PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo. PT. Tyfoundtex ini sendiri adalah salah satu perusahaan garmen terbesar di Surakarta. Adapun penelitian yang dilakukan Ristanti Padmaningsih ini adalah untuk mengetahui pengaruh produktifitas kerja karyawan terkait dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan yang di berikan perusahaan. Adapun produktifitas kerja karyawan dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan ketenangan karyawan saat bekerja, yaitu dengan memberikan

perlindungan serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah pengaruh jaminan keselamatan dan kesehatan yang baik juga akan menghasilkan produktifitas bekerja yang cukup tinggi.⁷

Hal yang membedakan penelitian Ristanti Padminingsih dengan penelitian yang ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Ristanti Padmaningsih adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sendiri adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Selain itu di dalam penelitian Ristanti Padmaningsih ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktifitas kerja yang dihasilkan pegawai, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Adapun perbedaan yang lain dalam penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ristanti Padmaningsih berada di PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah di PT. PAL Indonesia.

⁷ Ristanti Padminingsih, “*Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas karyawan pada PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo*”. Di akses pada tanggal 30 juni 2012 dari http://eprints.undip.ac.id/13549/1/D2D001164_RISTANTI_P.pdf

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, melakukan pencegahan kecelakaan kerja, mengelola bahan-bahan beracun berbahaya dan penanggulangannya, melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta menyusun program pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.

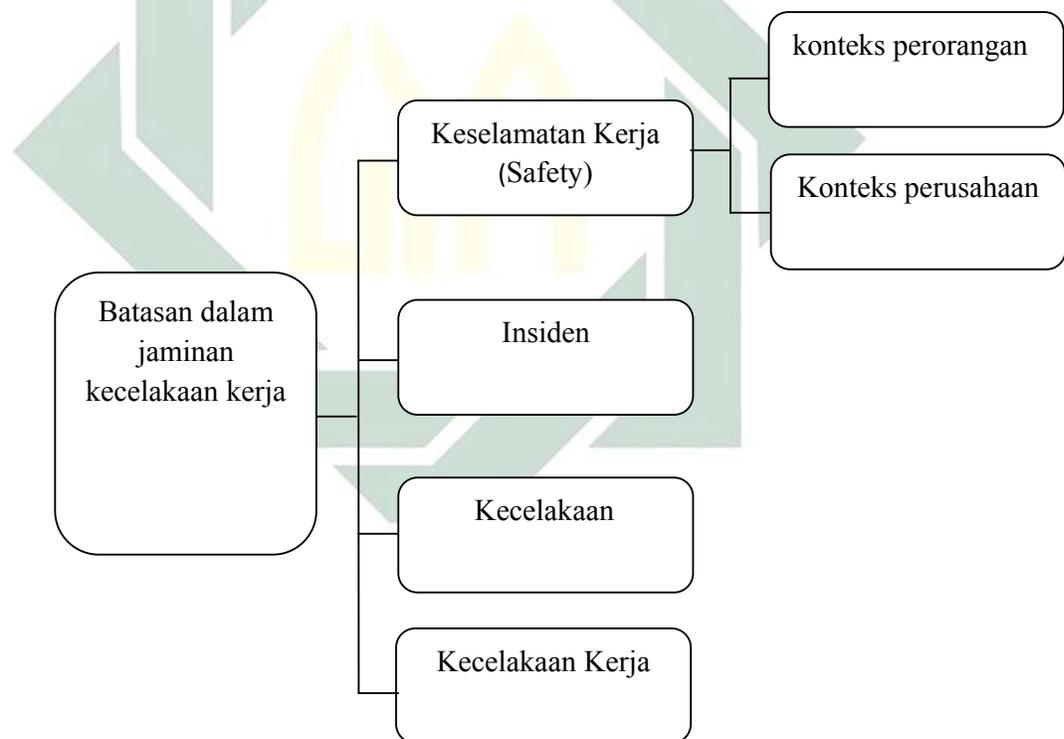
2) Alat pelindung diri (APD)

Menurut Muhammad Sabir alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan pekerja atau karyawan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Pada umumnya alat-alat elindung diri disuatu perusaahn tersebut terdiri adalah helm pengaman (*Safety Helmet*), Tali Keselamatan (*Safety Belt*), Sepatu Karet (*Sepatu Boot*), Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*), Tali Pengaman (*Safety Harness*), Penutup Telinga (*Ear Plug/ Ear Muff*), Kacamata Pengaman (*Safety Glasses*), Masker (*Respirator*), Pelindung Wajah (*Face Shield*), Jas Hujan (*Rain Coat*).

Kecelakaan yang dialami oleh seorang karyawan, semenjak dia meninggalkan kediamannya menuju tempat kerja selama jam kerja dan jam istirahat maupun sekembalinya dari tempat kerjanya menuju ke rumah.⁹

Penjelasan tentang batasan jaminan keselamatan di atas akan diilustrasikan sebagaimana gambar 2.2.

Gambar 2.2. : Batasan dalam jaminan keselamatan kerja.



Sumber : Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses*"

b. Teori K3 di Indonesia dan penerapan K3 di indonesia

⁹ Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses* " diakses pada tanggal 1juli 2012. dari <http://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html>

Keselamatan dan kesehatan kerja mutlak harus dilakukan dalam perusahaan sebagai usaha mencegah dan mengendalikan kerugian yang diakibatkan dari adanya kecelakaan, kebakaran, kerusakan harta benda perusahaan dan kerusakan lingkungan serta bahaya-bahaya lainnya. Sasaran pencapaian pengelolaan K3 adalah tidak adanya kecelakaan kerja yang disertai dengan produktivitas yang tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

Penerapan K3 adalah sebagai usaha penjabaran Undang-Undang No.1 tahun 1970 dari peraturan K3 lainnya dalam melakukan perlindungan terhadap aset perusahaan baik sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. K3 sudah terintegrasi didalam semua fungsi perusahaan baik fungsi perencanaan, produksi dan pemasaran serta fungsi-fungsi lainnya yang ada dalam perusahaan. Tanggung jawab pelaksana K3 di perusahaan merupakan kewajiban seluruh karyawan maupun semua orang yang bekerja atau berada dilingkungan perusahaan. Keberhasilan penerapan K3 didasarkan atas kebijakan pengelolaan K3 yang diambil oleh pimpinan perusahaan yaitu komitmen manajemen, kepemimpinan yang tegas, organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan, sarana dan prasarana yang memadai,

integritas K3 pada semua fungsi perusahaan dan dukungan semua karyawan dalam K3.

Keberhasilan penerapan K3 didasarkan atas kebijakan pengelolaan K3 yang diambil oleh pimpinan perusahaan yaitu komitmen manajemen, kepemimpinan yang tegas, organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan, sarana dan prasarana yang memadai, integritas K3 pada semua fungsi perusahaan dan dukungan semua karyawan dalam K3. Pada proses penerapan K3 itu sendiri, perusahaan menggunakan filosofi dasar pelaksanaan K3 sebagai berikut :

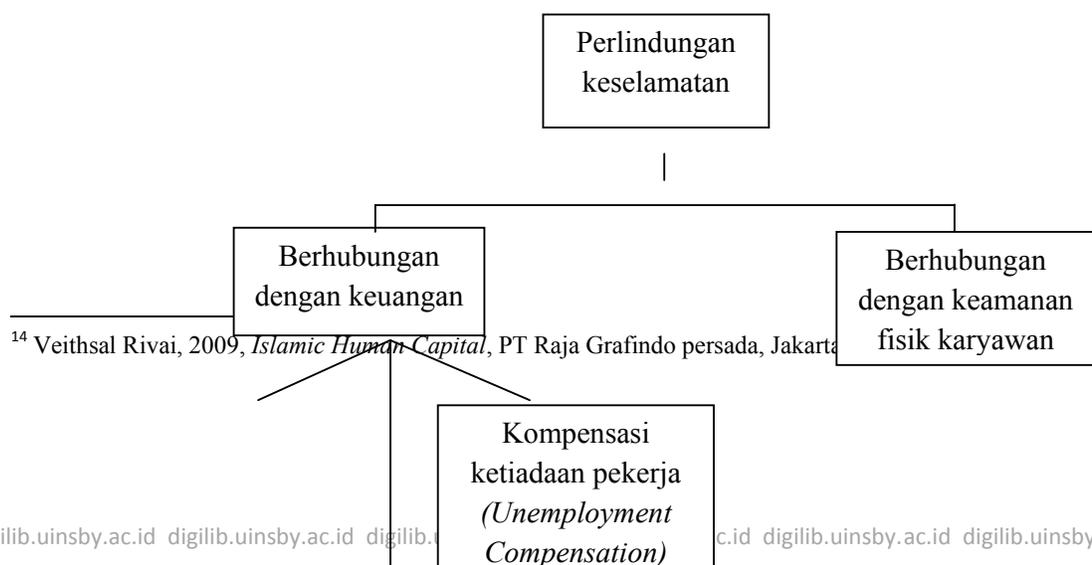
- 1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas.
- 2) Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu jaminan keselamatan.
- 3) Setiap sumber-sumber produksi yang digunakan secara efisien dan efektif.
- 4) Pengurus / Pimpinan perusahaan diwajibkan memenuhi dan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan K3 yang berlaku pada perusahaan dan tempat kerja yang dijalankan.

keselamatan dan keselamatan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan dan yang berhubungan dengan masalah keuangan. Hal yang berhubungan dengan masalah keuangan ini meliputi jaminan sosial (*Social Security*), kompensasi ketiadaan pekerjaan (*Unemployment Compensation*), biaya medis (*Medical Coverage*), dan kompensasi pekerjaan (*Worker's Sompensation*). Sedangkan jaminan yang berhubungan dengan masalah fisik karyawan disini adalah perusahaan menjamin keselamatan fisik para karyawan dan menyediakan fasilitas kerja untuk menjamin keamanan serta memberikan jaminan *financial* apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja. Selain itu perusahaan juga harus memberikan fasilitas kerja yang memadai agar keselamatan fisik dan mental mereka terlindungi dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁴

Agar lebih jelas, maka peneliti akan mengilustrasikan proses di atas sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.2 : Perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja



Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Dalam hal ini metode pengamatan (observasi) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Selain pengertian di atas metode pengamatan (observasi) dapat diartikan sebagai sebuah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis atau alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diteliti dari observasi.²⁹ Dari proses ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya.

Dengan menggunakan metode ini peneliti mendapatkan data tentang :

- 1) Lokasi PT. PAL Indonesia
- 2) Suasana kerja Karyawan
- 3) Fasilitas kerja untuk karyawan tetap dan tidak tetap
- 4) Alat pengaman kerja

b. Metode Wawancara (*Interview*)

²⁸ Sutrisno Hadi, 1983, "*Metodologi Research*", Hniversitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 136

²⁹ Sugiyono. 2008, *Metode penelitian administrasi*, hal. 166

PAL merupakan perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Keuangan.

Dengan SK Menteri Pertahanan tanggal 13 Juli 1957, No.UP/A/353/1957, pimpinan dan pengawasan untuk penyelenggaraan dan pengembangan PAL diserahkan dari Menteri Pertahanan Kepada KSAL selaku Wakil Menteri Pertahanan, terhitung mulai bulan April 1960. SK itu juga diperkuat dengan dikeluarkannya SK Menteri Keamanan Nasional No.MP/A/00380/60 tentang peraturan organisasi PAL.

Dengan Keputusan Presiden RI No.370/1960 tanggal 1 Juli 1960, PAL Surabaya dileburkan ke dalam Departemen Angkatan Laut dan selanjutnya digunakan untuk keperluan Angkatan Laut republik Indonesia (ALRI). Segala sesuatu yang berkaitan dengan peleburan PAL dan penyerahan ini kemudian diatur oleh Menteri Keamanan Nasional. Realisasi peleburan dan penyerahan kekuasaan dilakukan dengan dikeluarkannya SK Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kapel Staf Angkatan Bersenjata No.M/A/242/64 pada tanggal 1 Januari 1964, yang menentukan antara lain :

- a. Bahwa pengesahan atas PAL beserta kekayaannya diserahkan dari tangan Menteri Nasional a.q Menko Hankam/KSAB kepada Menteri Angkatan Laut.

pelanggaran aturan ini. Adapun undang-undang ini menyatakan bahwa :

- a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.
- b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.
- c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
- d. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.
- e. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, teknik dan teknologi.

Undang-undang di atas dibuat karena melihat perlunya jaminan keselamatan bagi para pekerja. Melihat hal tersebut maka jelas perusahaan wajib melindungi keselamatan karyawan dari segala resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Selain jaminan keselamatan kerja, perusahaan juga harus menerapkan sistem jaminan kesehatan bagi para pekerjanya. Perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas berupa pelayanan kesehatan kepada karyawan. Adapun hal yang harus diberikan terkait pelayanan kesehatan kerja kepada karyawan adalah cara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan dan melindungi kesehatan badan, kondisi mental maupun fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat pekerjaan yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta memeriksakan kesehatan secara berkala.

Hal ini juga diatur di dalam undang-undang keputusan menteri tenaga kerja tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan kerja bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja. Adapun keputusan menteri ini adalah :

- a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
- b. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.

panas atau dingin yang ekstrim pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (*impact*) dengan mesin peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (*vests*), celemek (*apron/coveralls*), jaket dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau sebagian badan.

8) Alat pelindung jatuh perorangan

Alat ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ketempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak terbentur lantai dasar. Jenis alat pelindung ini terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*) para binner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*) alat penurun (*descender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dll.

Untuk setiap karyawan mempunyai alat pelindung diri (APD) masing-masing yang harus di gunakan pada waktu bekerja dan di rawat sebagaimana mestinya. Karyawan akan

ditandatangani oleh kepala departemen di bagian mana karyawan itu bekerja.

Jaminan kesehatan yang diberikan PT. PAL Indonesia untuk karyawan juga di tunjang dengan asuransi-asuransi dari pihak luar seperti jamsostek untuk lebih melindungi jaminan kesehatan para karyawan. Adapun asuransi dari jamsostek ini adalah pelayanan kesehatan di poli-poli kesehatan maupun dari rumah sakit yang sudah dipilih menjadi rujukan. Untuk rumah sakit yang menjadi rujukan untuk karyawan tetap disesuaikan dengan tempat tinggal asal karyawan.

Adapun untuk rumah sakit rujukan bagi karyawan tetap PT. PAL Indonesia yang bertempat tinggal di Surabaya yang sudah menjalin kerja sama dengan PT. PAL Indonesia sebagai rumah sakit rujukan. Sementara untuk kelas perawatan yang diterima karyawan disesuaikan dengan tingkat jabatan atau kepangkatannya di PT. PAL Indonesia. Adapun untuk plafon biaya kecelakaan di PT. PAL Indonesia dari Jamsostek adalah sebesar 20 juta. Khusus untuk karyawan tetap apabila biaya perawatannya melebihi *Plafond* tersebut maka sisanya ditanggung oleh PT. PAL Indonesia

Sebagai misal, di PT.PAL Indonesia pernah terjadi sebuah kasus kecelakaan kerja yang menimpa salah satu

Untuk karyawan tidak tetap pihak PT. PAL Indonesia untuk sistem jaminan kesehatan hanya mengikatkan karyawan pada program jaminan kesehatan dari Jamsostek. Hal ini dilakukan karena setiap penerimaan karyawan baru, karyawan tersebut sudah langsung didaftarkan asuransi jamsostek dan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Jamsostek, maka jelas untuk karyawan tidak tetap tersebut untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan sudah dirujuk ke poliklinik atau rumah sakit yang sudah dipilihnya melalui asuransi Jamsostek. Selain itu untuk karyawan tidak tetap apabila mengalami kecelakaan kerja, maka karyawan tersebut tidak bisa terlebih dahulu diberi perawatan di klinik milik perusahaan, hal ini disebabkan karena mereka sudah diikutkan program Jamsostek.

Poliklinik yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat menangani karyawan tidak tetap namun dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah apabila kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan tersebut tergolong kecelakaan yang cukup parah (*Emergency*), pelayanan tersebut hanyalah penanganan pertama dan setelah itu di rujuk ke rumah sakit yang sudah diilih untuk menjadi rumah sakit rujukan. Adapun rumah sakit yang menjadi rujukan untuk karyawan tetap disesuaikan dengan tempat tinggal asal karyawan tersebut.

Dalam kecelakaan kerja yang dialami oleh para karyawan PT. PAL Indonesia tersebut juga bermacam-macam dan banyak faktor penyebab kecelakaan yang dialami oleh karyawan. Namun dalam beberapa tahun ini jumlah penyebab dasar kecelakaan yang dialami oleh karyawan tetap (Organik) juga mengalami penurunan. Jumlah ini dapat dilihat pada tahun 2010 dengan 2011 sudah mengalami penurunan jumlah penyebab kecelakaan. Pada tahun 2010 jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh tergores itu mencapai 10 karyawan, namun pada tahun 2011 jumlah kecelakaan akibat tergores menurun menjadi 4 karyawan. Hal yang sama juga terdapat pada kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh sinar las, yang terjadi pada tahun 2010 jumlah kecelakaan kerja yang dialami karyawan sejumlah 3 karyawan maka pada tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh sinar las tersebut berkurang bahkan hampir tidak ada kecelakaan kerja yang diakibatkan sinar las ditahun 2011.

Adapun perbandingan jumlah penyebab kecelakaan kerja karyawan tetap pada tahun 2010 dengan 2011 akan dituliskan oleh tabel 4.3 sebagai berikut

membahas berbagai hal yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Menurut Veithzal Rivai yang di tanggung perusahaan terkait dengan jaminan ini adalah ada dua hal yaitu sistem jaminan keselamatan dan keselamatan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan dan yang berhubungan dengan masalah keuangan. Hal yang berhubungan dengan masalah keuangan ini meliputi jaminan social (*Social Security*), kompensasi ketiadaan pekerjaan (*Unemployment Compensation*), biaya medic (*Medical Coverage*), dan kompensasi pekerjaan (*Worker's Sompensation*). Sedangkan jaminan yang berhubungan dengan masalah fisik karyawan disini adalah perusahaan menjamin keselamatan fisik para karyawan dan menyediakan fasilitas kerja untuk menjamin keamanan serta memberikan jaminan *financial* apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja. Selain itu perusahaan juga harus memberikan fasilitas kerja yang memadai agar keselamatan fisik dan mental mereka terlindungi dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

PT. PAL Indonesia memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sepenuhnya kepada karyawan yang bekerja, baik jaminan terkait dengan jaminan sosial, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, konspensasi pekerjaan, dan ekonomi, namun didalam pemberian jaminan ini terdapat perabedaan yang diberikan. Untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PAL Indonesia tersebut disesuaikan dengan status karyawan tersebut di PT. PAL Indonesia apakah karyawan tersebut sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap,

status karyawan tersebut sudah berkeluarga atau tidak, serta tingkat jabatannya di PT. PAL Indonesia. jadi untuk semua karyawan yang ingin mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan secara lengkap dari perusahaan akan mengalami perbedaan. Selain faktor jabatan, kriteria yang membedakan pelayanan K3 tersebut adalah status karyawan sudah berkeluarga atau tidak, serta status kepegawaian karyawan itu sendiri. PT. PAL Indonesia membedakan pelayanan K3 tersebut terhadap karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap atau kontrak. Adapun karyawan tetap akan mendapatkan pelayanan yang lebih dari pada karyawan kontrak. Sebagai misal, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karyawan tetap bisa langsung mendapatkan pelayanan tersebut melalui poliklinik yang dimiliki oleh perusahaan namun jika karyawan tidak tetap tidak akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari poliklinik tersebut, ini dikarenakan untuk karyawan tidak tetap sudah diikutkan kedalam jasa asuransi dari luar perusahaan, maka jika terjadi masalah kesehatan maupun kecelakaan kerja maka karyawan tidak tetap tidak lagi berurusan dengan perusahaan, melainkan dengan pihak asuransi yang terkait.

Dari teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai diatas terjadi sedikit ketidak samaan. Ketidaksamaan disini adalah untuk jaminan keselamatan dan kesehatan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tidak dibedakan. Seluruh karyawan berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan keselamatan kerja dari pihak perusahaan, karena sistem jaminan tersebut adalah tugas utama bagi perusahaan memberikan

Setelah penyajian data dan menganalisa data sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan,

1. Hak-hak yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia yang terkait dengan sistem jaminan keleselamatan dan kesehatan kerja adalah PT. PAL Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas penunjang agar tidak adanya kecelakaan yang di akibatkan pekerjaan. Fasilitas ini seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan, poliklinik, dan ditunjang oleh asuransi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para karyawan saat melakukan aktifitas pekerjaan.
2. Adapun untuk kriteria yang di gunakan PT. PAL Indonesia dalam menentukan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima oleh karyawan adalah status karyawan di PT. PAL Indonesia (pegawai tetap atau pegawai tidak tetap), status karyawan (sudah berkeluarga atau tidak) dan tingkat jabatan karyawan tersebut.
3. Perbedaan yang diterima oleh karyawan tetap dan tidak tetap adalah :
 - a. Karyawan tetap adalah selain mendapatkan asuransi dari Jamsostek karyawan tetap juga dapat pelayanan kesehatan dari poliklinik yan 100 pat di PT. PAL Indonesia

- Andhika, P.A., 2012, “ *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses*”, diakses pada tanggal 1 Juli 2012, dari <http://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html>.
- Arikunto, S., 2006, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azmi D, R., 2008, “*Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton Medan*”, diakses pada tanggal 16 Maret 2012, dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14644/1/09E01016.pdf>.
- Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 2006 “*Himpunan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*”.
- Febrianto, R., 2006, “ *Pentingnya Iplimentasi K3 dalam Perusahaan* ” diakses pada tanggal 2 Juli 2012, dari <http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/fspmi/message/710>.
- Gastalia, 2012, “*Analisis Penerapan Ssistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada area produksi Divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja*” , diakses pada tanggal 29 juni 2012. dari <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/13109/analisis-penerapan-sistem-manajemen-keselamatan-dankesehatan-kerja-k3-pada-area-produksi-divisi-fabrikasi-ptsanggar-sarana-baja.html/>.
- “*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*”, 2011, diakses pada tanggal 20 Maret 2012, dari <http://124v1.wordpress.com/2011/01/21/kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>.
- Kusuma, I.K., “ *Pelaksanaa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang* ,” diakses pada tanggal 31 Juni 2012 dari <http://eprints.undip.ac.id/26498/2/Jurnal.pdf>,
- Padminingsih, R., “*Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas karyawan pada PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo*”, diakses pada tanggal 30 Juni 2012 dari http://eprints.undip.ac.id/13549/1/D2D001164_RISTANTI_P.pdf.
- “*Pengertian Sistem*”, 2011, diakses pada tanggal 22 Juni 2012, dari <http://infoting.blogspot.com/2012/04/pengertian-sistem.html>.
- “*Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*” 2008, diakses pada tanggal 27 Maret 2012, dari

